

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan keakuratan dan kejelasan untuk penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu dengan mengangkat judul, objek dan subjek yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut :

Ahdony Asfiansyah (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Implementasi Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”)” dimana Pengumpulan data studi kasus ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*), Kuesioner dan studi dokumentasi (*study of document*). Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa matriks EFAS – IFAS menunjukkan *factor internal* (kekuatan – kelemahan) yang dimiliki oleh pemerintah kota “S”.

Selanjutnya penelitian terdahulu dari Friska Langelo, *et al.*, (2015), dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung” Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dan data diperoleh melalui studi lapangan, dalam hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No.71 tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akruaI.

Lalu penelitian dari Anggi Rizkianci (2010), dengan mengangkat judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau”. Metode pengambilan sampel menggunakan Rumus slovin. engumpulan data menggunakan survei kuesioner, dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan, sumber daya manusia, komitmen organisasi dan

teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Fadilah Madjid (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)”, di mana model pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian survey. Menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi akrual di pemerintah daerah sudah sangat baik. Khususnya tingkat implementasi akuntansi akrual dipengaruhi oleh ketersediaan sistem informasi serta kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya penelitian dari Ida Najati, *et al.*, (2016), dengan judul “Implementasi Berbasis Akrual Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga”, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *second order Confirmatory factor analysis* dengan bantuan program *smartpls* versi 2.0. Dimana hasil dalam penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi saiba tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual, sedangkan budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual, selain itu implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian /Lembaga (LKKL).

Dan terakhir penelitian dari Lilina Novianty Sari (2016), yang berjudul “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan”, Jenis datanya yang digunakan yaitu data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen, kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Sistem Akuntansi

Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub sistem yang lebih kecil yang juga tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian lain, Sistem adalah suatu entity yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *Computer Based System*, yang dapat diartikan terintegrasinya peralatan, program, data dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer.

Terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu kelompok yang menekankan pada prosedurnya dan yang mendefinisikan sistem, dan yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya. Pendekatan yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Suatu prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (*fills* menulis) biasanya melibatkan beberapa orang didalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Suatu prosedur adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya mengatakan sesuatu dapat dikatakan sistem apabila memenuhi 2 syarat:

- 1) Memiliki bagian-bagian yang saling berintegrasi dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan, bagian-bagian itu dinamakan subsistem.
- 2) Harus memenuhi 3 unsur Input-Proses-Output :
 - Input : Data Akuntansi, Faktur, Kuitansi
 - Proses : Proses Akuntansi, Peralatan dan Prosedur
 - Output : Laporan Keuangan

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan dan mengikhtikarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan, dimana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik- baiknya. Sistem akuntansi yaitu formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan baik dalam laporan-laporan, yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham kreditur dan lembaga – lembaga pemerintahan untuk memuat hasil operasi.

2.2.2. Basis Akuntansi Pemerintahan

2.2.2.1. Basis Akuntansi Kas

Basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi berbasis kas ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan-kelebihan akuntansi berbasis kas adalah laporan keuangan berbasis kas memperlihatkan sumber dana, alokasi, dan penggunaan sumber-sumber kas, mudah untuk dimengerti dan dijelaskan, pembuat laporan keuangan tidak membutuhkan pengetahuan yang mendetail tentang akuntansi dan tidak memerlukan pertimbangan ketika menentukan jumlah arus kas dalam suatu periode. Sementara itu keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya memfokuskan pada arus

kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yang mungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa saat sekarang dan saat mendatang, laporan posisi keuangan (neraca) tidak dapat disajikan karena tidak terdapat pencatatan secara *double entry*, tidak dapat menyediakan informasi mengenai biaya pelayanan (*cost of service*) sebagai alat untuk penetapan harga (*pricing*), kebijakan kontrak publik, untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

2.2.2.2. Basis Akuntansi Akrua

Basis akuntansi akrual (*accrual basis of accounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuan penerapan basis akuntansi akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan. Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas seluruh biaya yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan

basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya, akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

2.2.3. Modifikasi Akuntansi

2.2.3.1. Berbasis Kas

Basis akuntansi ini pada dasarnya sama dengan akuntansi berbasis kas, namun dalam basis ini pembukuan untuk periode tahun berjalan masih ditambah dengan waktu atau periode tertentu (*specific period*) misalnya 1 atau 2 bulan setelah periode berjalan. Penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tertentu tetapi diakibatkan oleh periode pelaporan sebelumnya akan diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran atas periode pelaporan yang lalu (periode sebelumnya). Arus kas pada awal periode pelaporan yang diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun lalu dikurangkan dari periode pelaporan berjalan.

Laporan keuangan dalam basis ini juga memerlukan pengungkapan tambahan atas item-item tertentu yang biasanya diakui dalam basis akuntansi akrual. Pengungkapan tersebut sangat beragam sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai tambahan atas item-item yang diungkapkan dalam basis kas, ada beberapa pengungkapan yang terpisah atas saldo *near-cash* yang diperlihatkan dengan piutang akan diterima dan utang yang akan dibayar selama periode tertentu dan aset finansial and kewajiban. Sebagai contoh Pemerintah Malaysia menggunakan *specified period* dalam laporan keuangan tahunan, yang mengungkapkan beberapa catatan (memo)

mengenai : aktiva, investasi, kewajiban, utang pemerintah (*public debt*), jaminan (*guarantees*), dan nota pembayaran.

Dalam basis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1) Fokus pengukuran di bawah basis ini adalah pada sumber keuangan sekarang (*current financial resources*) dan perubahan- perubahan atas sumber-sumber keuangan tersebut. Basis akuntansi ini mempunyai fokus pengukuran yang lebih luas dari basis kas, pengakuan penerimaan dan pembayaran kas tertentu selama periode spesifik berarti bahwa terdapat informasi mengenai piutang dan hutang, meskipun tidak diakui sebagai aktiva dan kewajiban.
- 2) Kriteria pengakuan atas penerimaan selama periode tertentu adalah bahwa penerimaan harus berasal dari periode yang lalu, namun penerapan ini tidak seragam untuk semua negara. Beberapa pemerintah menganggap bahwa seluruh penerimaan yang diterima selama periode tertentu adalah berasal dari periode sebelumnya, sedangkan pemerintah yang lain mengakui hanya beberapa dari penerimaan tersebut.
- 3) Penetapan panjangnya periode tertentu bervariasi antara beberapa pemerintah, namun ada beberapa ketentuan, yaitu:
 - a) Periode tertentu diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun;
 - b) Periode tertentu harus sama untuk penerimaan dan pembayaran kas;
 - c) Kriteria yang sama atas pengakuan penerimaan dan pembayaran kas selama periode tertentu harus diterapkan untuk seluruh penerimaan dan pembayaran;
 - d) Satu bulan adalah waktu yang tepat, karena pembelian barang secara kredit umumnya diselesaikan dalam periode tersebut, periode tertentu yang terlalu lama mungkin mengakibatkan kesulitan dalam menghasilkan laporan keuangan;
 - e) Kebijakan akuntansi yang dipakai harus diungkapkan secara penuh (*fully disclosed*).

2.2.3.2. Berbasis Akrua

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasi (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam praktek sebagai berikut ini:

- a) Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut;
- b) Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas;
- c) Pengakuan hanya untuk aktiva dan kewajiban finansial jangka pendek;
- d) Pengakuan seluruh kewajiban dengan pengecualian kewajiban tertentu seperti utang pensiun.

Beberapa penyusun standar telah mengidentifikasi kriteria atas waktu pengakuan pendapatan dengan akuntansi berbasis akrual, sebagai contoh Pemerintah Kanada mengakui pendapatan dalam periode di mana transaksi atau peristiwa telah terjadi ketika pendapatan tersebut dapat diukur (*measurable*). Pemerintah Federal Amerika Serikat mengakui pendapatan pajak dalam periode akuntansi di mana pendapatan tersebut menjadi *susceptible to accrual* (yaitu ketika pendapatan menjadi *measurable* dan *available* untuk mendanai pengeluaran). *Available* berarti dapat ditagih dalam periode sekarang atau segera setelah terjadi transaksi.

2.2.4. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)

SAIBA merupakan aplikasi akuntansi pemerintah pusat yang dibuat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual. Peranan aplikasi di sektor pemerintahan tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan sektor swasta. Instansi diharapkan bekerja dan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu instansi juga harus bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dimana anggaran tersebut sudah seharusnya terserap untuk kegiatan operasionalnya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pelaporan laporan keuangan yang menunjukkan berapa besarnya penyerapan anggaran yang digunakan beserta penjelasannya.

Kementerian Keuangan telah mengembangkan aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) menjadi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan setiap Kementerian Negara/Lembaga. Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau penggantian sebagian atau keseluruhan sistem informasi. Aplikasi SAIBA sebagai sistem akuntansi keuangan (*software*) yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual tentu saja menjadi salah satu faktor kunci implementasi akuntansi berbasis akrual. Pengoperasian aplikasi SAIBA akan menjadi maksimal bila para operator memiliki pemahaman tentang akuntansi dasar secara memadai. Pada saat pemahaman di bidang akuntansi dasar telah memadai, para operator aplikasi akan lebih mudah memahami Akuntansi Pemerintah Akrual dan mengoperasikan aplikasi SAIBA. Namun jika para operator mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA, maka akan memberi dampak yang tidak baik dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.

Tujuan dari diterapkannya basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan agar pengungkapannya lebih komperhensif. Hal ini sejalan dengan prinsip full disclosure (pengungkapan penuh). Artinya, bahwa informasi yang diungkapkan harus jelas, lengkap, dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan.

2.2.5. Penyusunan Laporan Keuangan

Pada SAP berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah:

1. Laporan Keuangan pokok yang disusun pada SAP lama (PP No. 24/2005) terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) *Transfer*
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur- unsur dalam neraca meliputi:

a) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c) Ekuitas

Kekayaan neto pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Catatan atas laporan keuangan sekurang- kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2.6. Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas merupakan salah satu prinsip dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hubungannya dengan manajemen publik, efektivitas berperan sebagai salah satu tolak ukur kinerja suatu organisasi. Pengertian efektivitas mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatkannya, cara mengaturnya, bahkan cara

menentukan fenomena efektivitas. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian efektif berarti “ada efeknya (akibat); dapat membawa hasil; berhasil guna (usaha, tindakan), sedangkan efektivitas berarti keefektifan”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas sebagai suatu akibat yang dikarenakan adanya suatu tindakan tanpa membandingkan hasil yang akan dicapai. efektivitas sistem informasi berbasis teknologi sebagai berikut:

- 1) Keamanan data, berhubungan dengan pencegahan bencana, baik karena tindakan disengaja, maupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi illegal access dan kerusakan pada sistem.
- 2) Waktu, berhubungan dengan kecepatan dan ketepatan informasi dalam permintaan pemakaian sistem. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi suatu laporan, baik secara periodik maupun nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah ditentukan.
- 3) Ketelitian, berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi. Pada volume data yang besar biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan penghitungan.
 - a) Variasi laporan atau output, berhubungan dengan kelengkapan isi informasi. Dalam hal ini tidak hanya mengenai volumenya, tetapi juga mengenai informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan penghitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi.
 - b) Relevansi, menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data. Fenomena relevansi menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan Laporan keuangan agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dengan menjalankan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 adalah ukuran ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, ada empat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

- **Relevan:** Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
- **Andal:** Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: Penyajian Jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.
- **Dapat dibandingkan:** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
- **Dapat dipahami:** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta

adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran pada penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA). Kerangka pemikiran adalah model konseptual yang menggambarkan hubungan diantara berbagai macam faktor yang telah diidentifikasi sebagai sesuatu hal yang penting bagi suatu masalah. Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 berupa laporan keuangan yang harus disusun terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Serta Efektivitas dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan, Relevan, Andal, Tepat waktu, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan adanya kerangka pemikiran ini akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap objek masalah penelitian. Berikut adalah kerangka pemikiran yang dibangun dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

